



**Analisis Anatomi Gerakan Kontra  
Rencana Pembangunan Megaprojek PLTU  
Kabupaten Batang**

**Nama: M. Hijrah Saputro**

**NIM: 14010110130127**

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro, Semarang

Email: [m.hijrah.saputra@gmail.com](mailto:m.hijrah.saputra@gmail.com)

## ABSTRACT

Steam power plant is a plant that relies on the kinetic energy of steam to produce electricity. Power plant is an alternative solution to solve the problem of electricity in Indonesia. Batang power plant is one national project that goes in MP3EI (Master Plan for the Acceleration of Indonesian Economic Development Equity). Social Movement UKPWR and Go Green rejected the plan to build the Batang's steam power plant. This study aims to analyze the anatomy of the Batang's plant cons movement of both types of movement to movement activities.

This study used qualitative methods to understand and interpret the meaning of an event interaction of human behavior in specific situations according to the perspective of researches. The collection data techniques that authors use in this study are interviews and literature.

The results showed that the power plant was built near Batang Regional Marine protected areas using land between 370 to 700 acres and to cost up to 40 trillion. Being rejected by local residents who are members of social movements into UKPWR is an abbreviation of 5 villages affected Batang's power plant. Residents fear the impact caused by the power plant. NGOs working in the field of environment is Go Green also rejected the power plant construction site which they are productive lands and areas that need to be conserved. The existence of the various protested make the development process is blocked until 3 years old.

Keywords: Power Plant, Social Movements, NGOs, Civil Society Organizations

## A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang memiliki luas wilayah yang cukup besar. Seiring dengan tidak meratanya jumlah persebaran penduduk pada setiap wilayah atau pulau yang ada di Indonesia, mengakibatkan adanya kesenjangan dan konsentrasi kepadatan penduduk hanya terdapat pada beberapa tempat saja, secara khusus hanya terdapat pada kota-kota besar saja. Realita tersebut menyebabkan persebaran pasokan listrik tidak merata, bahkan di tempat atau daerah terpencil masih ada yang belum dapat menikmati listrik. Selain itu kebutuhan akan listrik semakin meningkat seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menangani masalah tentang pasokan listrik di Indonesia yaitu PT. PLN dirasa masih belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan pasokan listrik yang memadai secara keseluruhan. Oleh karena itu, pihak yang menangani permasalahan listrik di Indonesia yang dibantu oleh pihak swasta dituntut untuk mengembangkan dan meningkatkan penyediaan energi untuk mengimbangi laju konsumsi energi di Indonesia dengan cara menggunakan alternatif bahan bakar terbaru selain minyak bumi dan gas, yaitu memanfaatkan cadangan baru salah satunya adalah batubara. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang menggunakan bahan bakar batubara dirasa adalah suatu alternatif yang bijak untuk memenuhi kebutuhan listrik di Indonesia. Pemerintah provinsi Jawa Tengah memilih Kabupaten Batang sebagai lokasi pembangunan

megaprojek PLTU dan hal tersebut juga telah ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman modal (BKPM) Jawa Tengah Nomor 1845/1/PPM/1/PMA/2011.

pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) itu sendiri yaitu pembangkit yang mengandalkan energi kinetik dari uap untuk menghasilkan energi listrik. Rencana pembangunan megaprojek PLTU berkapasitas 2x1000 megawatt di Kabupaten Batang ini diperkirakan akan menelan dana sampai 40 triliun rupiah dan akan menggunakan lahan seluas antara 370 hingga 700 hektar serta berada di lima desa, yaitu Desa Karanggeneng, Desa Wonorekso, Desa Ponowareng, Desa Roban dan Desa Ujungnegoro.

Rencana pembangunan megaprojek PLTU ini mendapat banyak protes dan kecaman dari berbagai pihak baik dari masyarakat sekitar maupun dari lembaga sosial masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan seperti *Greenpeace* dan *Go Green*. Menurut *greenpeace*, proyek melahap lahan pertanian produktif, sawah beririgasi teknis seluas 124,5 hektar, perkebunan melati 20 hektar, serta sawah tada hujan seluas 152 hektar dan yang paling mengejutkan, PLTU akan dibangun di Kawasan Konservasi Laut Daerah Ujungnegoro-Roban. Permasalahan pembebasan lahan yang sampai sekarang belum tuntas, memang dikarenakan munculnya pihak Kontra yang benar-benar mempertahankan diri untuk menolak adanya PLTU di desanya.

Saat ini Pemkab Batang sedang menyusun rencana zonasi (renzo) wilayah pesisir difasilitasi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Diharapkan renzo bisa

menyelesaikan konflik mengenai pemanfaatan ruang wilayah pesisir. Karena berbentuk perda, renzo akan berlaku sebagai ketentuan khusus untuk ruang wilayah pesisir. Renzo juga menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan. Isinya memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.

Terkait persoalan penolakan warga Batang atas pembangunan PLTU yang diperkirakan menelan dana Rp 35 triliun itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menuduh ada kepentingan di balik penolakan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap PLTU di Batang. Menurut dia spekulasi tanah dan sejumlah oknum ingin mendapat keuntungan dari pembangunan megaprojek itu. Aparat juga dituding berada dibalik kisruh PLTU Kabupaten Batang, oleh karena itu pemerintah diharapkan dapat berperan sebagai mediator diantara aktor-aktor yang terlibat agar adanya persetujuan bersama yang dapat menguntungkan semua pihak atau *win-win solution*.

Sejumlah elemen masyarakat masih beranggapan jika proyek terbesar di Asia Tenggara ini akan mengakibatkan kerusakan terhadap kawasan lingkungan dan warga akan kehilangan pekerjaannya karena lahannya untuk keperluan pembangunan PLTU itu. Bagaimanapun pembangunan PLTU, bakal berdampak terhadap hajat hidup masyarakat Kabupaten Batang, baik secara positif dan negatifnya.

## **B. PEMBAHASAN**

### **B.1 Pemetaan Kerawanan Desa Terkena dan Terdampak PLTU Batang**

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kabupaten Batang membuat laporan pemetaan kerawanan desa terkena dan terdampak Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang dengan uraian sebagai berikut:

1. Desa Ujungnegoro Kecamatan Kandeman
  - a. Kondisi wilayah di desa Ujungnegoro relatif aman dan kondusif. Masyarakat sudah menerima keberadaan rencana pembangunan megaprojek PLTU tersebut.
  - b. Ada beberapa hal yang masih perlu ditangani, antara lain:
    - 1) Ada warga yang belum mau menjual lahan karena pada awal proses pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), mereka menolak pembangunan tersebut. diantaranya keluarga Karomat (Aris dan Rumanah)
    - 2) Ada beberapa lahan yang belum terjual karena pemilik lahan menginginkan harga tanah diatas Rp 100.000,-/m<sup>2</sup> yaitu Hj. Nirmala, H. Machrus dan Ir. Totok Subiyanto.
2. Desa Karanggeneng Kecamatan Kandeman
  - a. Jumlah warga pro Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) ± 400 orang dan yang kontra Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) ± 345 orang. 53

orang diantaranya pemilik lahan dilokasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

- b. Sumber daya manusia (SDM) warga yang rendah sehingga mudah terprovokasi.
  - c. “POKOKE” adalah kata-kata dari warga kontra Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang hanya ikut-ikutan.
3. Desa Ponowareng Kecamatan Tulis
- a. Desa Ponowareng Kecamatan Tulis, jumlah warga pro Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) kurang lebih 487 orang dan warga kontra kurang lebih 729 orang dengan 18 orang diantaranya adalah pemilik lahan.
  - b. Warga kontra Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) melakukan koordinasi secara rutin antar desa saat terjadi kegiatan penolakan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
  - c. rumah sdr. Casnoto merupakan tempat diadakannya rapat rutin Antara warga, lembaga swadaya masyarakat (LSM) luar yaitu *Go green*, dan lembaga bantuan hukum (LBH) Semarang.
4. Dukuh Roban Barat Ds. Kedungsegog Kecamatan Tulis dan Dukuh Roban Timur Ds. Sengon Kecamatan Subah.
- a. Warga Roban Barat / Timur yang bekerja sebagai nelayan menolak dibangunnya proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan dalih mata pencaharian mereka terancam dan akan sulit nantinya.

- b. Warga Roban sebagian besar adalah pendatang yang sudah lama bermukim di wilayah tersebut, mereka mudah terprovokasi karena memiliki sifat emosional yang cukup tinggi sehingga sering berbuat anarkis dalam setiap aksi penolakan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
- c. Warga Roban dalam setiap aksi penolakan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sering berbuat anarkis sehingga memicu warga dari desa lain untuk berbuat anarkis juga.

## **B.2 Anatomi Gerakan UKPWR**

UKPWR mempunyai karakter-karakter yang termasuk dalam gerakan sosial baru (GSB), antara lain:

### 1) Ideologi dan Tujuan

Paguyuban UKPWR tidak mementingkan dasar-dasar ideologi yang ketat dalam setiap aksi penolakannya terhadap PLTU Batang dan lebih memperjuangkan isu-isu yang diusungnya. UKPWR seperti halnya pada sistem gerakan sosial baru (GSB) yaitu terdapat orientasi baru yang lebih cair diantaranya anggota-anggotanya dan tidak mengkhususkan diri pada orientasi yang besifat pada ideologis tertentu. Pergerakan yang dilakukan oleh UKPWR mirip dan relevan dengan teori marxisme yaitu para warga menuntut adanya keadilan dari pemerintah yang dianggap tidak bisa mengintervensi pihak konsorsium yang dianggap warga sebagai kaum kapitalis. UKPWR adalah

bentuk respon terhadap hadirnya dan menguatnya institusi yang menerobos masuk hampir ke relung kehidupan warga, sehingga paguyuban UKPWR melawan adanya ekspansi dan dominasi pasar. Orientasi dalam gerakan UKPWR adalah melawan tata sosial dan kondisi dominasi pemerintah dan pasar dengan cara menyerukan sebuah kondisi yang adil dan bermartabat bagi kaum yang tersisih.

## 2) Taktik dan Pengorganisasian

UKPWR menerapkan taktik yang bersifat mempengaruhi dengan mobilisasi orientasi opini publik untuk memperoleh posisi daya tawar yang seimbang dalam mempengaruhi proses penentuan arah kebijakan yang dibuat oleh pemegang wewenang. Pada UKPWR menggunakan taktik pada bentuk-bentuk gerakan yang cenderung demonstratif dan dramatis yang sudah direncanakan bersama sebelumnya dibanding dengan menggunakan cara-cara revolusioner yang bersifat destruktif dan merugikan banyak pihak karena apabila menggunakan kekerasan saat melakukan demonstrasi, menurut UKPWR malah akan mendapat pandangan negatif dari publik atau masyarakat. UKPWR bahkan melakukan aksi teatrikal pada saat menyuarakan aspirasi mereka karena menurut mereka aksi seperti itu dapat menarik perhatian dari masyarakat, media massa dan mempengaruhi para pengambil-pengambil kebijakan.

### 3) Struktur Gerakan

Struktur gerakan dalam UKPWR yaitu membangun organisasi gerakan secara kebersamaan para anggotanya dan tidak kaku sehingga gerakan yang diusung menjadi lebih kuat dan terstruktur. UKPWR menekankan adanya pengelolaan dan tatanan yang sehat dalam mengelola keadaan sosial masyarakat antara warga yang pro dengan warga yang kontra. Didalam paguyuban UKPWR tidak ada seorang pemimpin yang pasti dan lebih mementingkan kebersamaan agar tidak adanya perpecahan di dalam tubuh atau struktur gerakan. Basis dari struktur gerakannya adalah agar pengelolaan UKPWR lebih fleksibel dan mengedepankan musyawarah yaitu pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak sesuai dengan prasyarat yang telah disepakati sebelumnya. Para anggota UKPWR menyerukan dan membangun suatu struktur pengambilan keputusan yang dinamis, responsif sesuai apa yang diharapkannya selama ini. Suatu struktur yang mengakomodasi nilai-nilai demokrasi yang dipraktikkan, bersifat desentralitatif dan non-hirarkis.

### 4) Partisipan dan Aktor

Para anggota dari UKPWR berasal dari berbagai basis sosial yang terdiri dari berbagai latar belakang baik dari aspek gender, kelas sosial, latar belakang pendidikan, profesi atau pekerjaan dan aspek-aspek lainnya. Partisipan dan aktor dari UKPWR merupakan warga dari lima desa yang

nantinya akan terkena dan terdampak oleh pembangunan PLTU Batang dengan mayoritas profesi dari para anggota UKPWR adalah nelayan, petani dan buruh tani. Para anggota UKPWR bergabung karena adanya kesamaan perasaan dan bukan melalui adanya doktrinasi dari orang lain. Demokrasi menjadi bagian tak terpisahkan dalam pengorganisasian gerakan. Seperti kita ketahui bahwa UKPWR ini merupakan perpaduan dari kategori kelas menengah yang mandiri karena tidak terikat dengan motif-motif korporasi dan tidak tergantung pada dunia korporasi untuk kelangsungan hidup mereka.

##### 5) Medan atau Area

Memang persoalan yang diangkat oleh UKPWR adalah persoalan yang ada di daerah mereka. Namun mereka mengangkat isu tersebut hingga ke pemerintah pusat bahkan ke luar negeri yaitu Negara Jepang dengan mendatangi Kedutaan Besar Jepang untuk memprotes pemerintah Jepang yang akan melakukan investasi di daerah mereka yaitu mendirikan PLTU Batang yang berkapasitas 2000 MW. Isu-isu yang diangkat dan menjadi agenda bersama secara global tersebut tentu saja mempengaruhi perhatian masyarakat banyak dan mempengaruhi para penguasa dan swasta dalam mengambil keputusan. Hal tersebut bahkan memunculkan simpati dari NGO (*Non-Governmental Organization*) yang bergerak di bidang lingkungan yaitu *Greenpeace*.

### **B.3 Anatomi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) *Go Green***

Berikut adalah klasifikasi *Go Green*, berdasarkan jenis dari pergerakannya, antara lain:

#### **1. Lingkup**

Menurut lingkup gerakannya, maka *Go Green* termasuk kedalam gerakan reformasi yaitu gerakan atau organisasi yang didedikasikan untuk mengubah beberapa norma yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, biasanya adalah kebijakan dan hukum. *Go Green* tergolong organisasi atau gerakan yang mencakup seperti gerakan hijau yang menganjurkan serangkaian hukum ekologi, atau sebuah gerakan atau organisasi pengenalan yang menolak adanya pembangunan yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Sifat gerakan semacam itu tidak hanya terkait dengan masalah tetapi juga dengan metode yang dipergunakan, dari kemungkinan ada penggunaan metode yang sikap reformis non-radikal yang akan digunakan untuk pencapaian akhir tujuan, *Go Green* menuntut adanya pembangunan yang berkelanjutan yaitu upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, kedalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi mendatang.

## 2. Jenis perubahan

Apabila dilihat dari jenis perubahan yang diperjuangkan, *Go Green* termasuk kedalam organisasi atau gerakan yang bersifat konservatif, yaitu organisasi atau gerakan yang ingin menjaga norma-norma yang ada, nilai yang terkandung dalam suatu masyarakat, dan sebagainya. *Go Green* menganjurkan agar megaprojek PLTU tidak dibangun di kawasan yang dilindungi dan dipindah di lokasi lain dimana pembangunan juga dapat mengelola lingkungan hidup

## 3. jangkauan

Dilihat dari jangkauan yang dilakukan oleh *Go Green*, maka *Go Green* termasuk kedalam organisasi atau gerakan lokal yaitu *Go Green* memperjuangkan keutuhan dan kelestarian wilayah konservasi yang ada di Kabupaten Batang yang didasarkan pada tujuan lokal atau regional, seperti melindungi daerah alam tertentu yaitu terumbu karang dan biota-biota laut yang langka. *Go Green* mempertahankan ekosistem lingkungan yang akan dihancurkan untuk kepentingan masyarakat banyak.

## C. PENUTUP

### C.1 Kesimpulan

Dari hasil dan analisis pergerakan yang ada di bab sebelumnya, maka dapat saya tarik beberapa kesimpulan antara lain:

1. Gerakan UKPWR dan *Go Green* mempunyai kesamaan dalam bentuk pergerakannya yaitu termasuk kedalam jenis Gerakan Sosial Baru (GSB) dimana terdapat empat ciri dari, yaitu *pertama*, muncul sebagai respon atas kekuatan negara dan pasar yang pada era modern ini sudah sedemikian merasuknya kedalam masyarakat dan menghambat kebebasan pribadi untuk mengembangkan diri. *Kedua*, paradigma gerakan berbeda jauh dengan marxisme, pergerakannya pada umumnya bersifat nonkelas dan perhatiannya ditekankan tidak selalu pada hal materialistik. *Ketiga*, membatasi diri pada aksi sosial dengan semangat radikalisme membatasi diri. *Keempat*, citanya bersifat plural.
2. Aktivitas atau aksi penolakan yang dilakukan oleh para anggota UKPWR adalah dilatarbelakangi oleh beberapa alasan yaitu mereka takut kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian, mereka takut dampak negatif pengoperasian PLTU yang berbahan bakar batubara, mereka takut akan adanya perubahan kebiasaan atau budaya serta hilangnya kearifan lokal akibat adanya PLTU Batang. Sedangkan LSM *Go Green* melakukan aksi penolakan dengan dilatarbelakangi oleh keprihatinan atas ketidakadilan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan sumber-sumber kehidupan, sebagai akibat dari paradigma dan proses pembangunan yang tidak memihak keberlanjutan dan keadilan dimana proyek PLTU Batang menurut mereka berada pada kawasan konservatif.

3. Menurut jenisnya, gerakan UKPWR dan LSM *Go Green* dapat diklasifikasikan sebagai berikut: *pertama*, menurut lingkup gerakannya termasuk kedalam gerakan reformatif. *Kedua*, berdasarkan jenis perubahan yang ingin dicapai, termasuk dalam gerakan konservatif. *Ketiga*, apabila dilihat dari jangkauan yang dilakukuan oleh kedua gerakan kontra tersebut, maka dapat digolongkan sebagai gerakan lokal.
4. Dampak atau pengaruh yang ditimbulkan dari aktivitas penolakan yang dilakukan oleh gerakan UKPWR dan LSM *Go Green* terhadap rencana pembangunan megaprojek PLTU Batang adalah dengan molornya jadwal pembangunan PLTU Batang terutama pada proses pembebasan lahan sehingga rencana pembangunan PLTU Batang mundur sampai selama 3 tahun.

#### **4.2 Saran**

Dari berbagai kesimpulan yang telah diutarakan diatas, maka penulis mencoba memberi saran yang mungkin bisa menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan rencana pembangunan megaprojek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang, antara lain:

a. Pemerintah Pusat dan Daerah

Sebaiknya pemerintah lebih terbuka dan transparan serta gencar melakukan sosialisasi terhadap para masyarakat terutama warga yang terkena dan terdampak PLTU Batang terkait informasi dan penetapan keputusan sesuai dengan asas *Good Governance* yaitu melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik. Pemerintah harus mempunyai solusi bagaimana caranya agar bisa mengendalikan kedua gerakan kontra agar dari *un-negotiated* bisa menjadi *negotiated*.

b. PT. Bhimasena Power Indonesia

Selaku tender megaprojek PLTU Batang, PT. BPI diharapkan mampu mendekati warga untuk sosialisasi terkait PLTU Batang dan mengedepankan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan serta memperhatikan CSR (*Corporate Social Responsibility*).

c. UKPWR

Para anggota UKPWR diharapkan untuk tidak mudah terprovokasi dalam setiap aksi penolakan yang dilakukan sehingga selalu kondusif dan lebih efektif dan menghilangkan slogan “POKOKE” dalam setiap diskusi dan musyawarah bersama pihak pengambil keputusan agar dapat lebih mufakat sehingga terjadi titik temu antara kedua belah pihak.